

## **Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**

Sitti Putri Kasmiyanti<sup>1</sup>, Mapparenta<sup>2</sup>, c

<sup>1</sup> Magister Manajemen Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dalam penelitian ini menganalisis pada efektivitas pengelolaan keuangan dan efisiensi pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2011 s.d. 2015 sebagai berikut: 1) efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya 93,89 persen. 2) efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada kategori efisien, karena nilai efisiensinya 15,39 persen. Dengan demikian disarankan kepada pihak penentu kebijakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat mempertahankan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sehingga hasil yang dicapai dapat mencerminkan kinerja pegawai dan organisasi.

**Kata Kunci:** *kinerja pengelolaan keuangan*

### **Abstract**

This research aims to analyze and experts the performance finance management for Official Income Area of Makassar City. In this research analyze the effectiveness finance management and efficiency finance management. The results conducted that performance finance management at Official Income Area of Makassar City from 2011 to 2015 as follows: 1) effectiveness finance management at Official Income Area of Makassar City quite effective category, because the level effectiveness is 93,89 percent. 2) efficiency finance management at Official Income Area of Makassar City efficient category, because the level efficiency is 15,39 percent. So suggested to the policy makers at Official Income Area of Makassar City to maintain and encreaser the effectiveness and efficiency finance management until the outcomes could shown the performance of employees and organizations.

**Keywords:** *Performance finance management*

---

Copyright (c) 2019 N Sitti Putri Kasmiyanti

✉ Corresponding author :

Email Address : sittiputrikasmiyanti22@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fenomena perubahan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan. Orientasi sentralistik yang memiliki otoritas kekuasaan bergeser ke arah desentralisasi yang mengutamakan otonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pergeseran ini didukung dengan tuntutan demokratisasi yang berkembang dewasa ini. Model good governance merupakan sebuah jawaban untuk mengelola urusan-urusan publik yang semakin kompleks (Halim dan Iqbal, 2012). Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (value for money) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Yani (2009) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Darise (2008) hakikat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Bastian, 2006).

Upaya untuk mendukung potensi sumber-sumber keuangan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dapat dilihat besarnya target pendapatan asli daerah dan belanja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015, target pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sedangkan target belanja mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Maka dari itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar belum dilaksanakan dengan efektif. 2) Pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar belum dilaksanakan dengan efisien.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan penjelasan hasil penelitian dengan menggunakan tabel, gambar dan grafik dengan persentase data yang diolah. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis data, dengan menggunakan: 1)

Analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis data untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari pengamatan sumber data sekunder, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari obyek penelitian. Analisa ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sesuai dengan keadaan yang ada. 2) Rasio efektivitas, dalam hal ini rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dengan Rumus berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasar potensi ril daerah}} \times 100$$

Tabel 1 Kriteria Rasio Efektivitas

No.	Tingkat Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)
1	> 100 persen	Sangat efektif
2	100 persen	Efektif
3	90 – 99 persen	Cukup efektif
4	75 – 89 persen	Kurang efektif
5	< 75 persen	Tidak efektif

3) Sedangkan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100$$

Tabel 2 Kriteria Rasio Efisiensi

No.	Tingkat Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)
1	< 10 persen	Sangat efisien
2	10 – 20 persen	Efisien
3	21 – 30 persen	Cukup efisien
4	31 – 40 persen	Kurang efisien
5	> 40 persen	Tidak efisien

Ditetapkan definisi operasional dan pengukurannya dengan beberapa istilah sebagai berikut : 1) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 2) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (outcome) yang harus dicapainya. 3) Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. 4) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 6) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 7) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

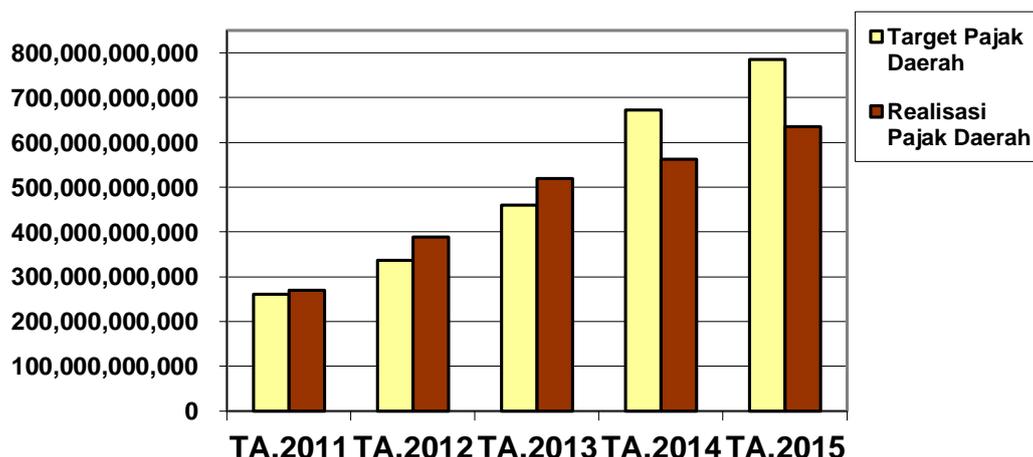
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri dari pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima. Sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Secara total realisasi PAD sebesar 644.748.988.242,06 rupiah dari target 801.449.943.000,00 rupiah atau sebesar 80,45 persen, terdiri dari realisasi pajak daerah sebesar 635.647.206.877,06 rupiah dari target 785.486.018.000,00 rupiah atau sebesar 80,92 persen dan realisasi retribusi daerah sebesar 9.101.781.365,00 dari target 15.963.925.000,00 atau sebesar 57,01 persen.

Tabel 3 Efektivitas Pajak Daerah Dispenda  
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Target Pajak Daerah (Rp.)	Realisasi Pajak Daerah (Rp.)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	260,486,460,000.00	270,547,821,316.00	103.86
2	2012	337,167,338,150.00	388,445,926,266.00	115.21
3	2013	460,567,090,000.00	518,703,083,895.00	112.62
4	2014	672,081,995,000.00	561,697,247,680.00	83.58
5	2015	785,486,018,000.00	635,647,206,877.06	80.92
Jumlah		2,515,788,901,150.00	2,375,041,286,034.06	94.41
Rata-rata		503,157,780,230.00	475,008,257,206.81	94.41



Gambar 1 : Target dan Realisasi Pajak Daerah Dispenda  
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 103,86 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2012 sebesar 115,21 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2013 sebesar 112,62 persen sehingga

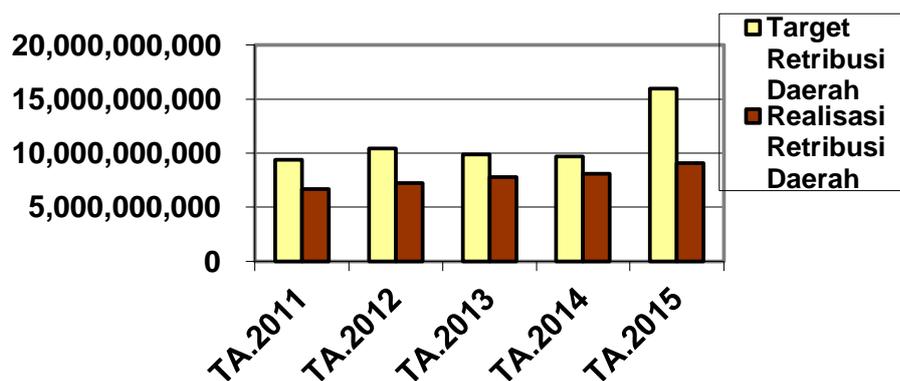
tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2014 sebesar 83,58 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2015 sebesar 80,92 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif.

Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 94,41 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori cukup efektif.

Sedangkan efektivitas retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Efektivitas Retribusi Daerah Dispenda

No.	Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp.)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp.)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	9,405,596,000.00	6,679,140,352.00	71.01
2	2012	10,427,561,850.00	7,213,272,639.00	69.18
3	2013	9,876,064,000.00	7,801,477,003.00	78.99
4	2014	9,680,827,000.00	8,109,845,648.00	83.77
5	2015	15,963,925,000.00	9,101,781,365.00	57.01
Jumlah		55,353,973,850.00	38,905,517,007.00	70.28
Rata-rata		11,070,794,770.00	7,781,103,401.40	70.28



Gambar 2 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dispenda Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

Berdasarkan pada tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 102,72 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2012 sebesar 113,83 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2013 sebesar 111,92 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2014 sebesar 83,58 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2015 sebesar 80,45 persen sehingga tingkat efektivitasnya dikategorikan kurang efektif.

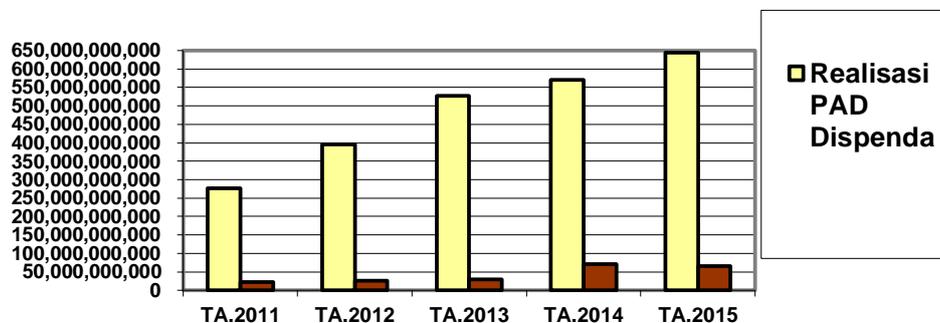
Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 93,89 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya rata-rata 93,89 persen.

Efisiensi pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada penelitian ini adalah berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD yang dibanding dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah belanja tidak

langsung/operasi dan belanja langsung/modal, dengan efisiensi belanja tidak langsung/operasi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Efisiensi Belanja Tidak Langsung/Operasi Dispenda  
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Realisasi Belanja Tidak Langsung/Operasi (Rp.)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	277,226,961,668.00	21,400,493,272.00	7.72
2	2012	395,659,198,905.00	26,391,062,636.00	6.67
3	2013	526,504,560,898.00	28,673,977,207.00	5.45
4	2014	569,807,093,328.00	71,304,041,541.00	12.51
5	2015	644,748,988,242.06	64,648,408,341.00	10.03
Jumlah		2,413,946,803,041.06	212,417,982,997.00	8.80
Rata-rata		482,789,360,608.21	42,483,596,599.40	8.80



Gambar 3 : Efisiensi Belanja Tidak Langsung/Operasi Dispenda  
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

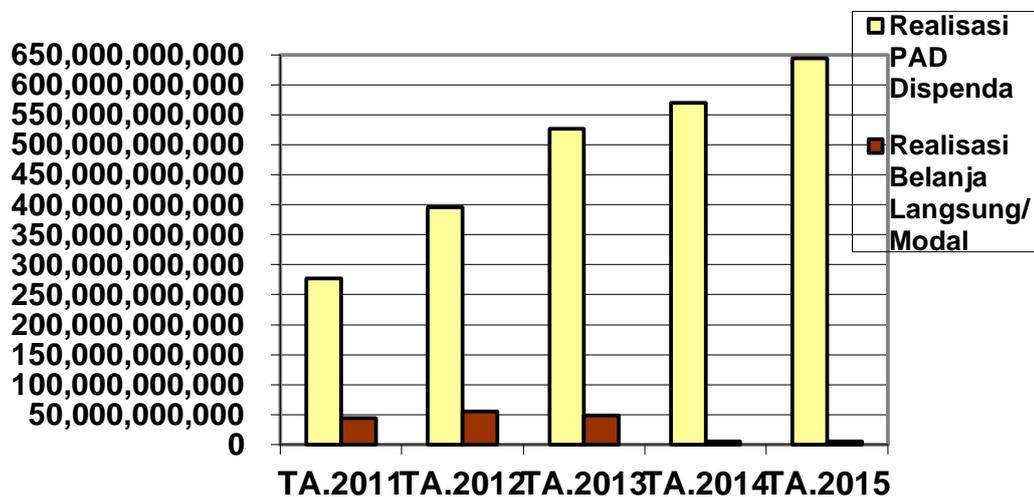
Berdasarkan pada tabel 8 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi belanja tidak langsung/operasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 7,72 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan sangat efisien, pada tahun 2012 sebesar 6,67 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan sangat efisien, pada tahun 2013 sebesar 5,45 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan sangat efisien, pada tahun 2014 sebesar 12,51 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien dan pada tahun 2015 sebesar 10,03 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien.

Dengan demikian rata-rata tingkat efisiensi belanja tidak langsung/operasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 8,80 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja tidak langsung/operasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori sangat efisien.

Sedangkan efisiensi belanja langsung/modal dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Efisiensi Belanja Langsung/Modal Dispenda  
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Realisasi Belanja Langsung/Modal (Rp.)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	277,226,961,668.00	44,250,526,415.00	15.96
2	2012	395,659,198,905.00	55,598,341,696.00	14.05
3	2013	526,504,560,898.00	48,799,561,638.00	9.27
4	2014	569,807,093,328.00	4,835,274,150.00	0.85
5	2015	644,748,988,242.06	5,555,222,314.00	0.86
Jumlah		2,413,946,803,041.06	159,038,926,213.00	6.59
Rata-rata		482,789,360,608.21	31,807,785,242.60	6.59



Gambar 4 : Efisiensi Belanja Langsung/Modal Dispenda Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

Berdasarkan pada tabel 6 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi belanja langsung/modal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 15,96 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien, pada tahun 2012 sebesar 14,05 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien, pada tahun 2013 sebesar 9,27 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan sangat efisien, pada tahun 2014 sebesar 0,85 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2015 sebesar 0,86 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan sangat efisien.

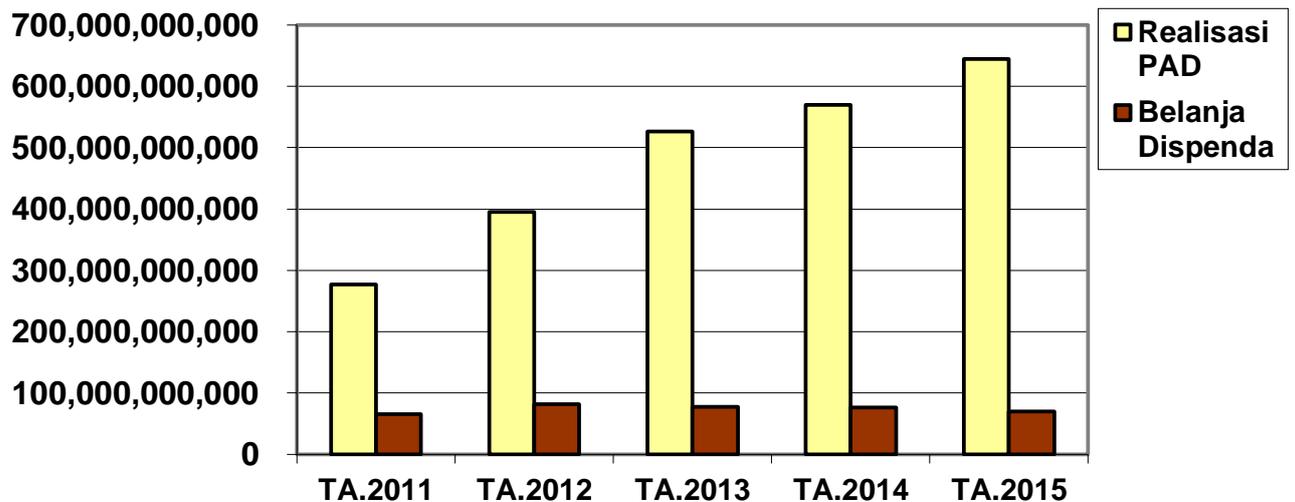
Dengan demikian rata-rata tingkat efisiensi belanja langsung/modal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 6,59 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori sangat efisien.

Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar maka biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD adalah belanja tidak langsung/operasi dan belanja langsung/modal dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 7 Efisiensi PAD Dispenda

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Belanja (Rp.)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	277,226,961,668.00	65,651,019,687.00	23.68
2	2012	395,659,198,905.00	81,989,404,332.00	20.72
3	2013	526,504,560,898.00	77,473,538,845.00	14.71
4	2014	569,807,093,328.00	76,139,315,691.00	13.36
5	2015	644,748,988,242.06	70,203,630,655.00	10.89
Jumlah		2,413,946,803,041.06	371,456,909,210.00	15.39
Rata-rata		482,789,360,608.21	74,291,381,842.00	15.39



Gambar 5 : Efisiensi Belanja Dispenda  
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

Berdasarkan pada tabel 10 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efiensi belanja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 23,68 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan cukup efisien, pada tahun 2012 sebesar 20,72 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien, pada tahun 2013 sebesar 14,71 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien, pada tahun 2014 sebesar 13,36 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien dan pada tahun 2015 sebesar 10,89 persen sehingga tingkat efisiensinya dikategorikan efisien.

Dengan demikian rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebesar 15,39 persen per tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori efisien, karena nilai efisiensinya rata-rata 15,39 persen.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011 ditargetkan Rp. 269.892.056.000,00 terealisasi Rp. 277.226.961.668,00 atau sebesar 102,72 persen dikategorikan sangat efektif disebabkan oleh optimalnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, pada tahun 2012 ditargetkan Rp. 347.594.900.000,00 terealisasi Rp. 395.659.198.905,00 atau sebesar 113,83 persen dikategorikan sangat efektif disebabkan oleh karena optimalnya koordinasi dengan

SKPD pengelola pendapatan unit kerja terkait optimalisasi potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pada tahun 2013 ditargetkan Rp. 470.443.154.000,00 terealisasi Rp. 526.504.560.898,00 atau sebesar 111,92 persen dikategorikan sangat efektif disebabkan oleh karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, pada tahun 2014 ditargetkan Rp. 681.762.822.000,00 terealisasi Rp. 569.807.093.328,00 atau sebesar 83,58 persen dikategorikan kurang efektif disebabkan oleh karena adanya mutasi pegawai sehingga perlu pembekalan kepada sumber daya manusia serta pada tahun 2015 ditargetkan Rp. 801.449.943.000,00 terealisasi Rp. 644.748.988.242,06 atau sebesar 80,45 persen dikategorikan kurang efektif disebabkan oleh lambatnya perekonomian nasional setidaknya berpengaruh pada iklim investasi yang berimbas langsung pada pencapaian realisasi beberapa sektor pajak diantaranya pajak BPHTB. Sementara disisi lain NJOP untuk PBB mengalami kenaikan yang bervariasi sehingga untuk transaksi jual beli terkadang tertunda karena nilai pajak yang akan dibayar belum memperhitungkan nilai kenaikan NJOP yang baru meskipun sesungguhnya dasar pembayaran pajak tetap mengacu kepada nilai transaksi sehingga kondisi tersebut menyebabkan beberapa transaksi jual beli berada pada posisi menunggu kepastian menyebabkan pajak BPHTB sampai dengan akhir tahun 2015 tidak dapat terealisasi secara optimal.

## **2. Efisiensi pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011 terealisasi Rp. 277.226.961.668,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 65.651.019.687,00 atau sebesar 23,68 persen dikategorikan cukup efisien disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung online system dalam melakukan perbaikan database wajib pajak dan retribusi daerah, pada tahun 2012 terealisasi Rp. 395.659.198.905,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 81.989.404.332,00 atau sebesar 20,72 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena belum optimalnya layanan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis IT secara terintegrasi online terpadu, pada tahun 2013 terealisasi Rp. 526.504.560.898,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 77.473.538.845,00 atau sebesar 14,71 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena sebagian database wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah terpisah-pisah belum terupdate dan terintegrasi secara terpadu kedalam online system, pada tahun 2014 terealisasi Rp. 569.807.093.328,00 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 76.139.315.691,00 atau sebesar 13,36 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena terbatasnya anggaran yang digunakan untuk mendukung penyediaan peralatan secara online serta pada tahun 2015 terealisasi Rp. 644.748.988.242,06 dengan belanja yang dikeluarkan Rp. 70.203.630.655,00 atau sebesar 10,89 persen dikategorikan efisien disebabkan oleh karena adanya kerja sama dan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan menggunakan teknologi berbasis IT secara terintegrasi online terpadu.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2011 s.d. 2015 sebagai berikut: 1) Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya rata-rata 93,89 persen. 2) Efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berada dalam kategori efisien, karena nilai efisiensinya rata-rata 15,39 persen.

## **Referensi :**

- Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Darise, Nurlan, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT. Indeks, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2009. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Edisi Kedua. PT. Indeks, Jakarta.
- Dharmayanti, 2012. Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal, 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mambuhu, Nur Mawati, 2009. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyo, Slamet, 2006. Analisis Pelaksanaan Kinerja Berbasis Kinerja, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. (Tidak dipublikasikan).
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti, 2010. Akuntansi sektor Publik. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Makassar.

- Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. 2012. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Makassar.
- Ratnawati, 2014. Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Sutedjo, 2009. Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal). Tesis S2 Program Pascasarjana. <http://eprints.undip.ac.id/24292/1/Sutedjo.pdf>. Diakses tanggal 1 Juli 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.